

**KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG DITANDATANGANI
TERPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

TESIS



Oleh

ZUIKO NANDA MULYONO
12212031

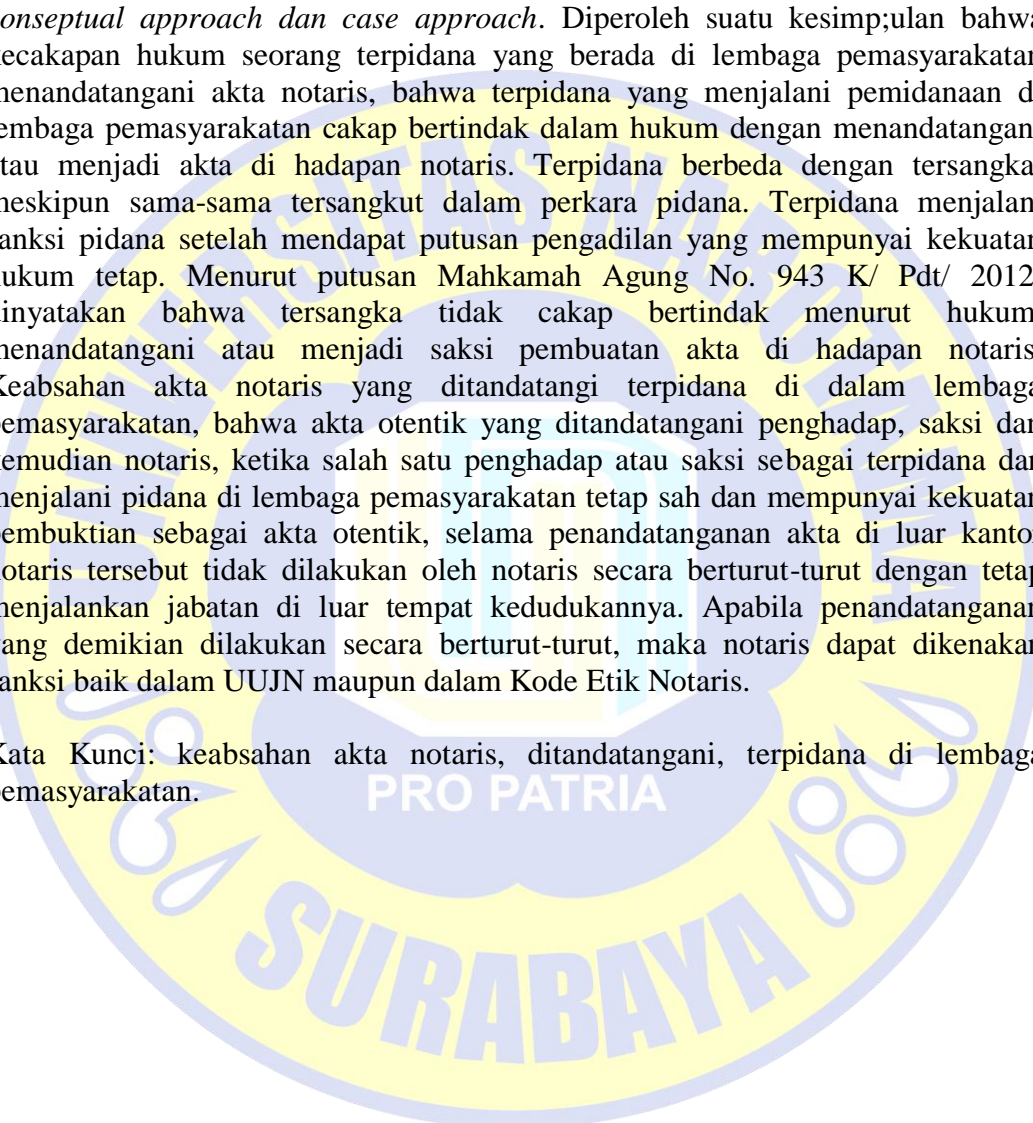
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA
S U R A B A Y A

2 0 1 6

ABSTRAK

Penelitian dengan judul keabsahan akta notaris yang ditandatangani terpidana di lembaga pemasyarakatan, permasalahan yang dibahas apakah seorang terpidana yang berada di lembaga pemasyarakatan cakap menandatangani akta notaris dan apakah akta notaris yang ditandatangani terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan sah menurut hukum. Penelitian dengan *statute approach*, *conseptual approach* dan *case approach*. Diperoleh suatu kesimpulan bahwa kecakapan hukum seorang terpidana yang berada di lembaga pemasyarakatan menandatangani akta notaris, bahwa terpidana yang menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan cakap bertindak dalam hukum dengan menandatangani atau menjadi akta di hadapan notaris. Terpidana berbeda dengan tersangka, meskipun sama-sama tersangkut dalam perkara pidana. Terpidana menjalani sanksi pidana setelah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut putusan Mahkamah Agung No. 943 K/ Pdt/ 2012, dinyatakan bahwa tersangka tidak cakap bertindak menurut hukum, menandatangani atau menjadi saksi pembuatan akta di hadapan notaris. Keabsahan akta notaris yang ditandatangani terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan, bahwa akta otentik yang ditandatangani penghadap, saksi dan kemudian notaris, ketika salah satu penghadap atau saksi sebagai terpidana dan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan tetap sah dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, selama penandatanganan akta di luar kantor notaris tersebut tidak dilakukan oleh notaris secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Apabila penandatanganan yang demikian dilakukan secara berturut-turut, maka notaris dapat dikenakan sanksi baik dalam UUN maupun dalam Kode Etik Notaris.

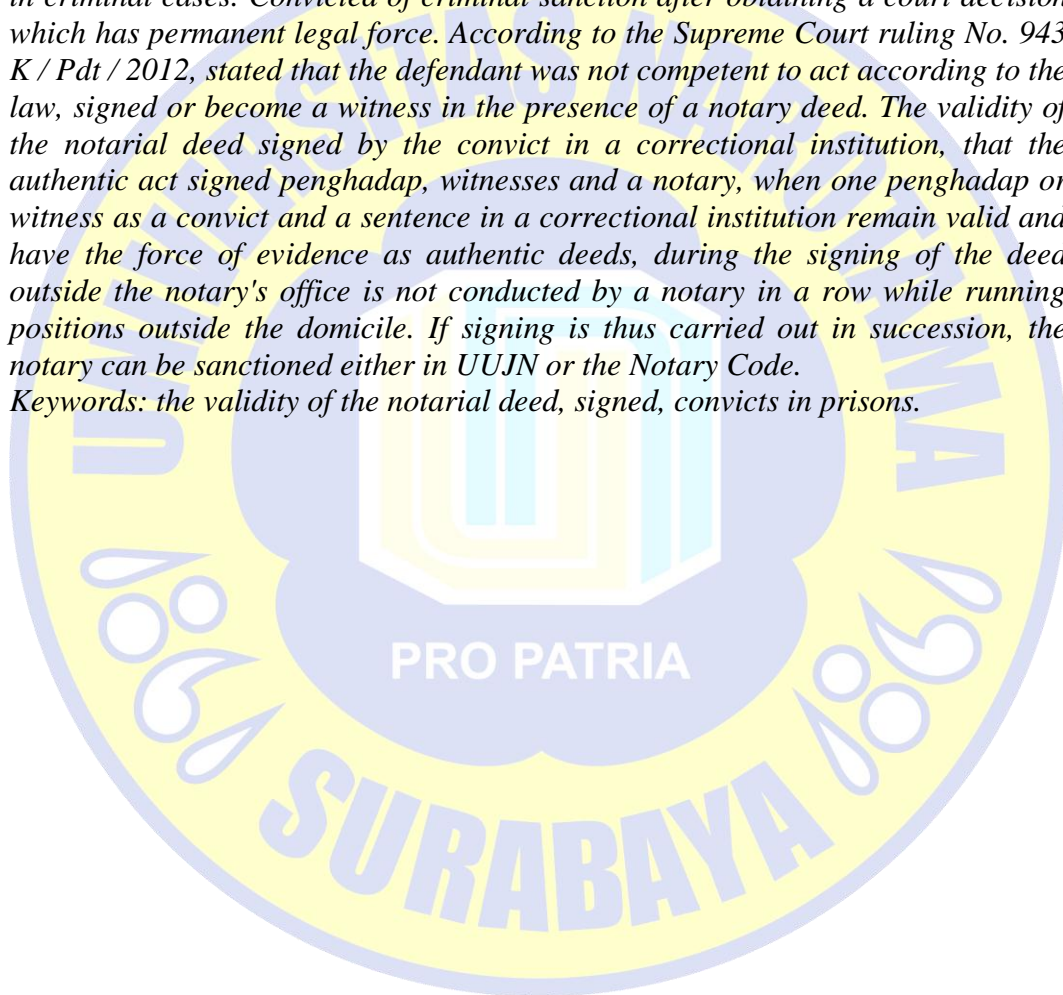
Kata Kunci: keabsahan akta notaris, ditandatangani, terpidana di lembaga pemasyarakatan.



ABSTRACT

Research into the validity of the title deed of the notary who signed inmates in prisons, the issues discussed were whether a convicted person in a correctional institution competent to sign a notary and notary deed is signed convicts in correctional institutions authorized by law. Research by statute approach, conceptual approach and case approach. Obtained a kesimp; ulan that the legal capacity of a convict who are in prisons signed the notarial deed, that convicts serving punishment in penitentiary capably acted within the law by signing or be deed before a notary. In contrast to convict a suspect, although equally involved in criminal cases. Convicted of criminal sanction after obtaining a court decision which has permanent legal force. According to the Supreme Court ruling No. 943 K / Pdt / 2012, stated that the defendant was not competent to act according to the law, signed or become a witness in the presence of a notary deed. The validity of the notarial deed signed by the convict in a correctional institution, that the authentic act signed penghadap, witnesses and a notary, when one penghadap or witness as a convict and a sentence in a correctional institution remain valid and have the force of evidence as authentic deeds, during the signing of the deed outside the notary's office is not conducted by a notary in a row while running positions outside the domicile. If signing is thus carried out in succession, the notary can be sanctioned either in UUJN or the Notary Code.

Keywords: the validity of the notarial deed, signed, convicts in prisons.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah- Nya, sehingga penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“Keabsahan Akta Notaris yang Ditandatangani oleh Terpidana dalam Lembaga Pemasyarakatan”**.

Tesis ini disusun guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Program Pasca Sarjana (S2) pada Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya. Penulisan tesis ini juga bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya Ilmu hukum yang terkait Keabsahan Akta Notaris, sehingga dapat memberikan kontribusi akademis mengenai gambaran terkait Akta Notaris.

Dalam proses penyusunan , segala hambatan dan rintangan dapat teratasi berkat bantuan, bimbingan , dorongan dan arahan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Yth :

1. Hj. Rr. Iswachyu Dhaniartin DS. ST., M.HP. Selaku Rektor Universitas Narotama
2. Prof. Dr. H. Afdol, S.H.M.S., Selaku Dekan Ilmu Hukum Universitas Narotama
3. Dr. Habib Adjie, S.H.M.Hum. Selaku Ketua program Megister Ilmu Hukum Universitas Narotama

4. Rusdianto Sesung, S.H.M.H. Selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan pengarahan yang baik sampai penyelesaian penulisan tesis ini.
5. Kedua orang tua Imam Mulyono.,Drs.MM. dan Hj. St. Farida Iriani.SE.MM.
6. Dr. dr. Dwikora N.Utomo, Sp.OT.,fics., Dr.Lukitra.D.,SP.FKR,(K). Selaku Paramedis yang memberi dukungan serta bantuan Do'a dan rekan sejawat beliau.
7. Terimakasih kepada untuk rekan sejawat, seprofesi dan seperjuangan.
8. Terimakasih kepada senior-senior yang telah mengajarkan Ilmu Politik Hukum dan Hukum Politik.
9. Terimakasih kepada rekan dan kerabat seperjuangan Notariat Narotama VI.
10. Terimakasih kepada Ust.KH.Achmad Zawawi, beserta keluarga besarnya yang memberi dukungan Spiritual dan selalu mengingatkan “ Semua Keberhasilan Mu adalah Kehendak Allah SWT”
11. Terimakasih kepada Keluarga Handai Taulan, kerabat, serta seluruh keluarga besarnya.
12. Terimakasih juga kepada keluarga besar Al-Manar grup, beserta rekan Remaja Muslim Al-Manar atas segala dukungan dan Do'a, sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Pada akhirnya , penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang

membangun demi kesempurnaan tesis ini. Harapan penulis , semoga tesis ini bermanfaat, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat bagi kita semua. Amin.

Surabaya, Maret 2016

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	8
3. Tujuan Penelitian	8
4. Manfaat Penelitian	8
5. Kajian Pustaka	9
5.1. Akta yang Dibuat Di Hadapan Notaris	9
5.2. Lembaga Pemasyarakatan	14
6. Metode Penelitian	15
6.1. Tipe Penelitian	15
6.2. Pendekatan Masalah	15
6.3. Bahan Hukum	15
6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	16
6.5. Analisis Bahan Hukum	16
7. Sistematika Penulisan	17
BAB II : KECAKAPAN HUKUM SEORANG TERPIDANA YANG BERADA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN	

MENANDATANGANI AKTA NOTARIS	19
1. Kecakapan Membuat Perjanjian	19
2. Kecakapan Orang yang Berada Dalam Lembaga Pemasyarakatan Menjalani Sanksi Pidana Dalam Akta Notaris	28
3. Wewenang Notaris Membuat Akta	40
BAB III : KEABSAHAN AKTA NOTARIS YANG DITANDATANGI TERPIDANA DI DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN	52
1. Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Akta	52
2. Prosedur Pembuatan Akta Di Hadapan Notaris	66
3. Akibat hukum Akta yang Dibuat Notaris Tidak Memenuhi Prosedur	71
4. Tanggung Jawab Notaris	73
4.1. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris	73
4.2. Berdasarkan Kode Etik Notaris	78
BAB IV : PENUTUP	85
1. Kesimpulan	85
2. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kecakapan hukum seorang terpidana yang berada di lembaga pemasyarakatan menandatangani akta notaris, bahwa terpidana yang menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan cakap bertindak dalam hukum dengan menandatangani atau menjadi akta di hadapan notaris. Terpidana berbeda dengan tersangka, meskipun sama-sama tersangkut dalam perkara pidana. Terpidana menjalani sanksi pidana setelah mendapat putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Menurut putusan Mahkamah Agung No. 943 K/ Pdt/ 2012, dinyatakan bahwa tersangka tidak cakap bertindak menurut hukum, menandatangani atau menjadi saksi pembuatan akta di hadapan notaris.
- b. Keabsahan akta notaris yang ditandatangani terpidana di dalam lembaga pemasyarakatan, bahwa akta otentik yang ditandatangani penghadap, saksi dan kemudian notaris, ketika salah satu penghadap atau saksi sebagai terpidana dan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan tetap sah dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta otentik, selama penandatanganan akta di luar kantor notaris tersebut tidak dilakukan oleh notaris secara berturut-turut dengan tetap menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Apabila penandatanganan yang demikian dilakukan secara berturut-turut, maka notaris dapat dikenakan sanksi baik dalam UUJN maupun dalam Kode Etik Notaris.

2. Saran

- a. Hendaknya mengenai kecakapan hukum seorang terpidana yang berada di lembaga pemasyarakatan menandatangani akta notaris tersebut mendasarkan pada ketentuan pasal 1329 jo pasal 1330 KUH Perdata, karena menyatakan orang tidak cakap bertindak menurut hukum, padahal telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan, dapat dikatakan mematikan hak keperdataan, padahal tiada suatu hukuman pun yang mengakibatkan kematian perdata.
- b. Meskipun seorang terpidana yang menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan cakap bertindak dalam hukum dengan menandatangani akta notaris, namun hendaknya notaris tidak secara berturut-turut menandatangani akta di luar kantor, karena selain mempengaruhi otentikitas akta juga menghindari sanksi bagi notaris yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- _____, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- _____, *Menjalin Pemikiran-Pendapat tentang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- _____, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Andasasmita, Komar, *Notaris I*, Sumur Bandung, Jakarta, 1981
- Andreae, S.J. Fockema, *Rechtgeleerd Handwoorddenboek, Bij J.B. Wolter Uitgeversmaat*, N.V. Gronogen, Jakarta, 1951
- Badruzaman, Mariam Darus, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Budiono, Herlien & Albertus Sutjipto, *Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris*, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 2005
- Hadjon, Philipus M., *Tentang Wewenang*, Majalah "YURIDIKA", No. 5 – 6 Tahun XII, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, September-Oktober, 1997
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- _____, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, (Alih Bahasa M. Isa Arief), Intermasa, Jakarta, 1986
- Prayitno, AA Andi, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, PMN, Surabaya, 2010

Prayitno, Roesnastiti, "*Tugas dan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta*", *Media Notariat* No. 12-13 Tahun IV, Oktober 1998

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Sumur Bandung, 1991

Setiawan, Wawan, *Komentar dan Tantangan terhadap Kedudukan dan Keberadaan Notaris/PPAT menurut dan di dalam Sistem Hukum Indonesia*, *MEDIA NOTARIAT*, Majalah Triwulan, Ikatan Notaris Indonesia, No. 12-13 Tahun IV, Oktober, 1989

Simanjutak, Rihardo, *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Gramedia, Jakarta, 2006

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1995

_____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2004

Syahrani, Riduan, *Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988

Thong, Tan Kie, *Studi Notariat dan Serba-serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007

Tobing, Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1980

Vollmar, *Inleiding tot de studie van het Nederlands Burgerlijk Recht*, Terjemahan Adiwimarta, Gajahmada, Yogyakarta, 1962

Wahyudi, Isa, Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility : Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*, In-Trans Publishing, Malang, 2008